

DAMPAK PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME

Rahmi Fitriyanti¹, Ammar Judistia², Julia Ulvatmi³, Ratu Hanun T.W.A⁴, Siti Nurhaliza⁵

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹²³⁴⁵

Abstract

The economic protectionism carried out by Trump has had both positive and negative impacts on countries in the world. This paper focuses on the positive impact of US protectionism on its cooperation with Indonesia based on a Constructivism Perspective. The approach used is a qualitative method using secondary data. The US protectionism policy carried out by Trump resulted in the outbreak of a trade war with China throughout the 2017-2020 period, where this succeeded in shocking the international community. During the crisis and world economic tensions, Indonesia managed to overcome a few of these things that it had a positive impact that benefited Indonesia, namely the transfer of several US-imported goods from China to Indonesia and the increasing interest of foreign investors in Indonesia. The analysis is carried out using the ontology of Constructivism which is divided into three, namely, historical, norms, and ideas built by Indonesia for the United States. Indonesia is advised to maintain good relations by building the right nation branding towards the US and China, even though Indonesia is not in favor of either of them.

Keywords: *Impact, Protectionism, USA, Indonesia, Constructivism Economic Problems; Belt and Road Initiative (BRI); China; National Interest; Leadership; Hegemony*

Abstrak

Proteksionisme ekonomi yang dilakukan Trump berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Tulisan ini berfokus pada dampak positif proteksionisme AS terhadap kerjasamanya dengan Indonesia berdasarkan Perspektif Konstruktivisme. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Kebijakan proteksionisme AS yang dilakukan oleh Trump mengakibatkan pecahnya perang dagang dengan China sepanjang periode 2017-2020, dimana hal ini berhasil mengejutkan dunia internasional. Pada masa krisis dan ketegangan ekonomi dunia, Indonesia berhasil mengatasi beberapa hal tersebut sehingga berdampak positif yang menguntungkan Indonesia yaitu dialihkannya beberapa barang impor AS dari China ke Indonesia dan meningkatnya minat investor asing di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan ontologi Konstruktivisme yang terbagi menjadi tiga, yaitu sejarah, norma, dan gagasan yang dibangun Indonesia untuk Amerika Serikat. Indonesia disarankan untuk menjaga hubungan baik dengan membangun nation branding yang tepat terhadap AS dan China, meskipun Indonesia tidak berpihak pada keduanya.

Kata kunci: Dampak, Proteksionisme, USA, Indonesia, Masalah Ekonomi Konstruktivisme; Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI); Cina; Kepentingan Nasional; Kepemimpinan; Hegemoni

Copyright (c) 2023 Rahmi Fitriyanti¹, Ammar Judistia², Julia Ulvatmi³, Ratu Hanun T.W.A⁴, Siti Nurhaliza⁵.

✉ Corresponding author : Rahmi Fitriyanti

Email Address: pipitfitriyanti77@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara *super power*, Amerika Serikat selalu menjadi sorotan berbagai negara dari segi ekonomi, militer, hingga politik. Donald Trump yang semula memiliki latar belakang pengusaha melihat ekonomi AS banyak dirugikan dengan adanya pasar bebas. Sejak terpilih sebagai Presiden AS pada 2016, Trump berupaya melindungi produk AS terhadap produk impor dari negara lain. “*Make America Great Again*” menjadi slogan yang mengantarkan Donald Trump pada kekuasaan. Tak lama setelah diangkat sebagai Presiden AS, Trump mengeluarkan kebijakan proteksionisme sebagai bentuk perlindungan dan pengendalian terhadap impor dan ekspor. Adapun beberapa proteksionisme AS di antaranya menaikkan tarif impor hingga 45% bagi produk buatan Cina, AS menyatakan keluar dari *Trans Pacific Partnership* (TPP), dan bahkan melarang masuknya imigran ke AS (Kurniawati, 2020). Proteksionisme yang dikeluarkan Trump pada akhirnya membuat AS menjadi sorotan dunia.

Proteksionisme sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh negara untuk menahan perdagangan antarnegara melalui beberapa metode, seperti, memberlakukan tarif barang impor, pembatasan kuota barang, serta peraturan pembatasan lain yang dirancang untuk mencegah impor serta pengambilalihan asing atas pasar dan perusahaan domestik (Fouda, 2012). Khusus proteksionisme yang dilakukan Trump didasari oleh tiga hal berikut ini: 1). Janji kampanye Trump, 2). Pengaruh industri domestik AS, 3). Sumbangan dana kampanye (Kurniawati, 2020).

Selain dari faktor internal, perang dagang antara Cina dan AS sejak 2018 terjadi akibat kekesalan Presiden AS, yaitu Donald Trump. Rasa kesal ini disebabkan karena neraca perdagangan AS yang selalu tercatat defisit dengan Cina. Karena itulah Trump menetapkan bea masuk impor panel surya, baja, hingga aluminium. Dengan adanya proteksionisme ekonomi oleh Trump tentunya berdampak terhadap negara-negara di dunia, baik itu dampak positif maupun negatif. Mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah Cina, maka kebijakan proteksionisme yang diambilnya tentu akan berdampak pula secara positif dan negatif terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

Budi Bowoleksono yang merupakan Duta Besar RI untuk AS, membenarkan bahwa kebijakan proteksionisme AS memberikan dampak. Namun, secara tidak langsung, proteksionisme ini juga memberikan gambaran konsep baru dari perdagangan AS, yaitu “*Fair and Reciprocal*” (adil dan timbal-balik) yang difokuskan pada persoalan surplus dan defisit. Bowoleksono juga menambahkan bahwa dengan adanya proteksionisme, maka potensi kedua negara ini masih terbuka. Terutama setelah Indonesia melihat AS sebagai pasar teknologi terpenting bagi Indonesia. Begitupun bagi AS, maka Indonesia merupakan pasar penting, terutama untuk produk nonmigas, seperti, pakaian, perikanan, dan alas kaki. Oleh karena itu, Bowoleksono menyampaikan pesan kepada AS agar tidak memfokuskan perhatiannya kepada persoalan surplus dan defisit saja, karena mereka juga memiliki banyak potensi di bidang perdagangan internasional (Natalia, 2018).

Pada saat yang sama, kebijakan antiglobalisasi Trump juga berdampak buruk bagi negara-negara yang bergantung padanya, salah satunya Indonesia. Namun, di sisi lain, impor pangan dan industri tekstil dari Indonesia masih sangat dibutuhkan oleh AS. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme AS tersebut berpotensi melemahkan ekonomi AS, terutama dengan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara mitra kerja sama ekonomi yang strategis bagi AS.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka tulisan ini bertujuan menganalisis dampak positif dari proteksionisme AS yang dilakukan oleh Trump terhadap Indonesia berdasarkan sudut pandang Perspektif Konstruktivisme. Fokusnya adalah mengetahui dampak yang dihasilkan dari adanya proteksionisme Trump terhadap kerjasama AS dan Indonesia dalam perdagangan internasional. Sedangkan manfaat dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca, sehingga pembaca diharapkan mampu memprediksi sikap Indonesia terhadap isu tersebut serta mampu memahami

fenomena lain dengan menggunakan sudut pandang dan teori dalam Hubungan Internasional.

KERANGKA PEMIKIRAN

Lahir pada akhir Perang Dingin tahun 1990-an, Konstruktivisme seringkali menarik perhatian banyak cendekiawan HI atas keberaniannya menentang dua kubu sekaligus, yakni antara Teori Rasionalis dan Teori Kritis (Reus Smith, 2014). Secara garis besar, Konstruktivisme percaya bahwa sistem gagasan, kepercayaan, dan nilai bersama juga memberi pengaruh kuat dalam tindakan sosial politik. Hal ini dapat dilihat dari tulisan salah satu tokoh besar Konstruktivisme yang erat kaitannya dengan premis “*anarchy is what states make of it*”, yaitu Alexander Wendt (Rachmawati, 2021).

Menurut Wendt, Konstruktivisme memiliki makna umum bahwa suatu kondisi sosial berasal dari rangkaian konstruksi gagasan yang telah diproses. Konstruktivisme menentang rasionalis yang selalu menganggap aktor sebagai makhluk yang egois, seperti halnya Realisme yang pesimis akan sifat alamiah manusia dan Liberalisme yang selalu memikirkan keuntungan semata bagi negara (Reus Smith, 2014). Konstruktivisme justru menganggap semua aktor adalah makhluk yang sangat sosial, di mana identitas mereka dipengaruhi oleh norma, nilai, dan ide yang dilembagakan masyarakat. Dengan kata lain, segala bentuk tindakan yang dilakukan aktor dapat dibentuk oleh pengaruh-pengaruh tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, Konstruktivisme melihat peluang bahwa ketika aktor berupaya untuk mengkonstruksi gagasan agar seirama dengan aktor lainnya, setidaknya membangun citra atau gagasan yang baik dengan aktor lainnya, maka timbal balik yang diperoleh adalah sebuah sekutu, mitra, dan hubungan baik. Sementara itu, jika aktor memiliki kondisi perbedaan pandangan, ideologi, dan citra yang buruk antara satu dan lainnya, maka timbal balik yang diperoleh adalah sebuah pertentangan, konflik, serta permusuhan. Konstruktivisme memiliki garis besar mengenai ide, gagasan, serta citra para aktor sehingga *shared ideas* dipercaya akan sangat membantu aktor untuk memahami satu dengan yang lainnya. Sedangkan Ontologi Konstruktivisme di antaranya adalah: 1) pentingnya melihat kajian historis dalam hubungan internasional; 2) pentingnya norma, aturan, dan bahasa terhadap reaksi HI; 3) Konstruktivisme melihat bahwa politik yang terjadi adalah ‘sesuatu yang dibentuk’ oleh konstruksi sosial yang ada (Rachmawati, 2021).

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder berdasarkan sudut pandang Perspektif Konstruktivisme. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mengembangkan teori-teori HI, khususnya Teori HI yang merupakan turunan dari Perspektif Konstruktivisme. Selain itu, adanya harapan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta mampu mendeskripsikan fenomena dan dampak sesuai realitas yang ada.

Sedangkan hasil dari penelitian ini untuk melihat reaksi dan langkah yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada, serta mengetahui dampak positif akibat kebijakan proteksionisme ekonomi AS oleh Donald Trump berdasarkan Perspektif Konstruktivisme.

PEMBAHASAN

Dampak Proteksionisme Amerika Serikat terhadap Indonesia

Perang dagang yang terjadi antara AS dan Cina sepanjang periode 2017-2020 berhasil memberi kejutan bagi masyarakat internasional. Donald Trump sebagai Presiden AS yang memiliki prinsip ‘*America First*’ kemudian membuat kebijakan ekonomi kontroversial akibat keresahannya saat melihat neraca perdagangan AS yang kerap kali berada di bawah Cina. Trump yang berlatar belakang pengusaha dapat memahami bahwa pasar bebas ternyata justru merugikan AS. Atas respon tersebut, Trump pun menerapkan kebijakan

proteksi ekonomi AS dengan memberlakukan tarif tinggi untuk produk impor, terutama pada pesaing ekonomi terberatnya, yaitu Cina. Sepanjang periode 2017-2020, Cina merupakan negara yang saling tergantung dengan AS, yakni sebagai mitra terbesar kedua AS dalam perdagangan internasional (Sahide, 2021).

Dalam melancarkan strateginya, AS senantiasa meningkatkan tarif impornya terhadap Cina. Beberapa di antaranya adalah tarif impor baja dan aluminium produk impor Cina yang ditingkatkan hingga 25%. Sementara itu, Cina juga tak tinggal diam dengan turut meningkatkan pula tarif impor AS sebesar 15% hingga 25% untuk produk impor agrikultur yang berasal dari AS (Batubara, 2019). Proteksionisme yang dilakukan AS ini akhirnya memicu perang dagang yang berdampak bagi negara mitranya, baik itu dari sisi positif maupun negatif.

Sedangkan hal positif yang dapat diamati terkait fenomena ekonomi ini untuk Indonesia tentunya beragam, terlepas dari maraknya krisis ekonomi yang terjadi di dunia. Tahun 2018, pemerintah Indonesia berusaha membuka peluang pasar yang ditinggalkan AS dan Cina (Aprilianti, 2019) dengan melakukan kerjasama multiregional bersama kedua negara tersebut. Indonesia melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan perekonomian perdagangan di sektor produksi baja dan aluminium. Sayangnya, strategi tersebut tak berdampak signifikan terhadap Indonesia karena sektor baja dan aluminium bukanlah produk utama Indonesia, di mana Indonesia hanya memiliki pasar kecil di AS.

Kegagalan dari strategi sebelumnya tak membuat Indonesia putus harapan dari segala krisis yang menerjang. Berdasarkan data sepanjang periode 2017-2020 (Hadi et al., 2020), investor asing termasuk dari AS dan Cina semakin tertarik pada negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Diketahui bahwa negara berkembang memiliki resiko kerugian yang lebih sedikit dibanding negara maju yang memiliki keterlibatan besar pada fenomena *trade war*. Indonesia sendiri menjadi primadona incaran para investor asing karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini diindikasikan oleh kinerja pasar yang bergerak positif terhadap investor asing yang tertarik pada perusahaan kelapa sawit berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (Ulfa & Gustyana, 2018).

Situasi ini kembali terjadi di beberapa sektor barang impor AS yang meningkat masuk ke Indonesia berdasarkan data yang ada. Pengalihan barang ini terjadi akibat pemberlakuan tarif impor AS yang tinggi terhadap Cina, negara mitra utama AS sebelum perang dagang terjadi. Dampaknya, Indonesia menjadi “negara peralihan” bagi barang impor AS. Hal ini tentu menjadi berkah di tengah kesulitan ekonomi yang melanda sepanjang periode tersebut. Beberapa sektor barang yang berangsur naik, di antaranya adalah kendaraan kereta api serta aksesorisnya, instrumen optik, foto dan videografi, serta peralatan kedokteran dan bedah (Ratna & Anindita, 2018). Namun, beberapa barang tersebut sempat mengalami penurunan kembali akibat pandemi Covid-19 melanda.

Perang dagang yang disebabkan oleh AS mulai merambat ke dalam perekonomian dunia. Hal ini membuat pemerintah melakukan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Begitu pula dengan peningkatan ekonomi UMKM yang menyebabkan perekonomian Indonesia meningkat hingga 5,18 persen. Dengan ini, investor lokal tertarik untuk menanamkan modalnya terhadap industri, salah satunya UMKM lokal dengan memberikan bantuan berupa sumber daya manusia, keterampilan, hingga peralatan. Hal ini dilakukan agar terjadi pemerataan pertumbuhan di sektor industri dan ekonomi UMKM (Sitorus, 2021).

Persepsi Konstruktivisme terhadap dampak Proteksionisme AS terhadap Indonesia

Kebijakan proteksionisme AS terhadap Cina mengundang atensi cendekiawan berbagai negara untuk meneliti fenomena tersebut dari berbagai perspektif. Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan mitra dengan AS dan Cina ternyata tak hanya terimbas dampak negatif saja. Terlepas dari menurunnya neraca perdagangan Indonesia

terhadap keduanya, juga memiliki beberapa dampak positif yang di antaranya telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa di antaranya sebagai focus analisis ini adalah para investor AS dan Cina yang kian tertarik pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Ulfa & Gustyana, 2018), serta peningkatan beberapa barang impor AS dan Cina yang berangsur naik ke Indonesia (Ratna & Anindita, 2018).

Atas segala ketegangan yang terjadi, beberapa hal ini menghasilkan pertanyaan dasar mengenai korelasi antara kebijakan proteksionisme AS dan dampak positif yang diperoleh Indonesia selama periode perang dagang terjadi berdasarkan Perspektif Konstruktivisme.

Perspektif Konstruktivisme yang menjunjung tinggi *shared ideas* sebagai landasan utama bagi para aktor untuk bertahan dalam sistem yang dinamis. Hal ini membuat Indonesia perlu menetapkan urgensinya untuk membangun citra baik AS terhadap situasi yang terjadi sepanjang periode 2017-2020 akibat kebijakan proteksionisme yang dikeluarkan oleh Trump. Oleh karena itu, proses analisis keterkaitan ini dibagi ke dalam tiga bagian berdasarkan basis ontologi konstruktivisme, yakni: 1) berdasarkan kajian historis antara hubungan AS dan Indonesia; 2) berdasarkan norma, aturan, nilai, dan bahasa yang diimplementasikan Indonesia; 3) berdasarkan *ideas* yang dibentuk Indonesia terhadap AS.

Pada poin pertama berdasarkan kajian historis antara hubungan AS dan Indonesia, maka relasi historis di antara kedua negara telah dimulai sejak 1949, tepatnya ketika Belanda melakukan Agresi Militer yang melanggar kesepakatan yang dirundingkan oleh Komisi Tiga Negara PBB. Ketika itu, AS berusaha menekan Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini terjadi setelah AS ragu dan terus bersikap netral karena AS memiliki kepentingan politis cukup erat dengan Belanda (Triyono, 2020).

Hubungan politik pemerintahan Orde Lama antara Indonesia dan AS tak begitu erat karena kondisi politik dunia saat itu sedang memanas akibat Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet. Hal inilah yang membuat Presiden RI saat itu, Soekarno, kemudian memilih “kubu tengah” atau Gerakan Non-Blok. Namun, bukan berarti Indonesia memiliki kesan buruk terhadap AS. Buktinya, terdapat beberapa kali kunjungan Soekarno ke AS serta kedekatannya dengan Presiden AS pada masa itu, John F. Kennedy (Ghifari, 2019).

Kesan cukup baik ini kemudian dilanjutkan dengan hubungan diplomatis lainnya yang membuat Indonesia dan AS memiliki relasi yang berangsur membaik dalam bekerjasama. Relasi positif ini dibuktikan dengan adanya kedekatan Indonesia dan AS ketika masa Orde Baru, yakni pada era pemerintahan Soeharto. Saat itu, AS memberi pinjaman modal, memberi bantuan beras, tenaga ahli, hingga bantuan di bidang pendidikan kepada Indonesia, yang kemudian dibalas dengan ekspor berbagai produksi alam Indonesia ke Amerika Serikat.

Selanjutnya, pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati merupakan masa pembuktian Indonesia kepada AS terhadap ancaman *War of Terror* tragedi 9/11, yang ditunjukkan dengan turut bergabungnya Indonesia ke dalam *Counter Terrorism Committee (CTC)* disertai dengan mendirikan Badan Pemberantas Teroris, yaitu Densus 88 (Sukadis, 2018).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga mengklaim sebagai negara yang tak simpatik terhadap aksi teroris. Sikap ini kemudian membuat kedudukan Indonesia seakan sejajar dengan AS, tanpa mengancam satu sama lain. Sementara itu, di sektor pertahanan, antara Indonesia dan AS pada masa pemerintahan Susilo B. Yudhoyono (SBY) telah memiliki hubungan yang baik sepanjang periode 2004-2014. Dalam hal ini, SBY juga berusaha memperkuat hubungannya bersama AS melalui motto “*thousand friends zero enemy*”, yakni dengan meminimalisir konflik di antara keduanya (Sukadis, 2018).

Kemudian, pada masa pemerintahan Joko Widodo, Presiden AS Donald Trump dengan terbuka memuat obrolan dengan Jokowi dalam KTT G20, dan berencana menguatkan kerjasama mereka pada tahun 2017 silam (Rzn, 2017). Latar belakang historis

tersebut berpotensi membuat AS mengalihkan sebagian eksportnya kepada Indonesia dibandingkan ke negara lainnya sepanjang periode 2017-2020. Argumentasinya, kerja sama ekonomi yang telah dibentuk bahkan setelah Indonesia merdeka telah membuktikan bahwa Indonesia dapat “dipercaya” dan tak mengancam AS seperti Cina dalam mengekspor barangnya ke Indonesia.

Pada point kedua mengenai klasifikasi norma, nilai, dan bahasa yang diimplementasikan Indonesia terhadap AS dapat pula diartikan sebagai tindakan serta kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi hubungan kerjasamanya dengan AS, di mana hal ini terkait dengan kepentingan politis Indonesia. Selain menjadi mitra bagi AS, Indonesia juga memiliki identitas ganda di arena internasional yang cukup bertentangan dan menjadi dilema, yakni sebagai negara nonblok yang menjalin kerjasama dengan banyak negara lainnya. Termasuk Kerjasama dengan “musuh” AS itu sendiri, seperti, Cina atau Rusia. Identitas ganda ini membuat AS kerap kali menggunakan beragam cara agar Indonesia berpihak pada AS di berbagai kesempatan.

Salah satunya, ketika Indonesia secara tak konsisten mendukung AS untuk maju dalam keanggotaan *East Asia Summit*, sementara sebelumnya Indonesia sempat menolaknya. Atau ketidakjelasan posisi Indonesia dalam menyikapi serangan AS terhadap Afghanistan. Saat itu, beberapa media massa menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia mengecam perbuatan AS atas serangannya kepada Afghanistan. Namun, kenyataannya justru Presiden Megawati dalam kunjungan kerjanya ke Washington secara terang-terangan mendukung apa yang dilakukan oleh AS. Tekanan dan sikap tersebut memberi kesimpulan bahwa AS memandang Indonesia sebagai negara yang dapat menyesuaikan norma, nilai, dan bahasa sesuai keinginan AS. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah musuh atau ancaman bagi AS. Dengan demikian, wajar jika AS mempercayai “pengalihan impornya” kepada Indonesia dibanding negara lainnya bila mengacu pada Perspektif Konstruktivisme ini.

Sementara poin ketiga, yakni *ideas* yang dibentuk Indonesia terhadap AS sangat menarik sebab pembahasan ini terkait dengan sejumlah citra baik Indonesia di mata AS. Poin ini berkaitan erat dengan poin sebelumnya yang membahas citra Indonesia sebagai negara nonblok. Keadaan AS sebagai negara besar yang selalu membuat kebijakan kontroversial sangat bertentangan dengan Indonesia sebagai negara nonblok yang memiliki citra terhadap perdamaian dunia. Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa AS bukanlah sebagai mitra dekat maupun musuh, sehingga kemungkinan keberpihakan Indonesia di segala situasi tak menentu.

Dalam menyikapi hal ini, AS pada akhirnya selalu membuat Indonesia sebagai *second choice* dalam segala situasi. Salah satunya adalah “pengalihan impor” AS yang mulanya ditujukan kepada Cina, kemudian berubah haluan ditujukan bagi Indonesia. Citra lain yang dibentuk Indonesia adalah sebagai negara pemasok Sumber Daya Alam yang besar, terutama di sektor pertanian, yaitu, kopi, kakao, karet, serta minyak kelapa sawit (Kementerian Perdagangan RI, 2022).

Besarnya asset kekayaan alam Indonesia ini tentu menjadi perhatian banyak negara lain, termasuk AS. Selain itu, citra Indonesia sebagai negara antiteroris juga sangat berpengaruh terhadap hubungannya dengan AS. Hal ini mengingat bahwa AS sangat sensitif terhadap isu-isu terorisme pasca peristiwa 9/11 sehingga kemudian AS menempatkan diri sebagai “polisi dunia” dalam penanganannya terhadap aksi teroris.

Ketiga analisis tersebut seakan menjadi bukti bahwa kajian historis, norma, serta *idea* atau citra yang dibangun Indonesia berpengaruh terhadap kebijakan Amerika Serikat. Indonesia seakan beruntung memiliki hubungan netral dengan AS. Hal ini ditandai dengan kebijakan proteksi yang memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Pentingnya *nation branding* yang ditekankan Konstruktivisme ternyata benar, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu negara dapat mendorong kepada terbentuknya persepsi baik atau buruknya citra negara pelaku terhadap negara lainnya.

Potensi Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pada Masa Depan

Perekonomian global saat ini sedang mengalami gejolak, terutama akibat “perang dagang” antara AS dan Cina yang menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Perang dagang tersebut dipicu oleh defisit perdagangan AS yang besar dengan mitra dagang Cina, yaitu USD375 juta (Puspitarini, 2020). Akibat kebijakan “perang dagang” AS terhadap Cina, maka Indonesia berada di bawah tekanan internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat bertindak bijak dengan memanfaatkan kondisi “perang dagang” tersebut bagi keuntungan Indonesia sendiri. Akan tetapi, mengingat Indonesia telah terlambat dalam memanfaatkan momentum “perang dagang” antara AS dan Cina tersebut, akibatnya Indonesia tidak termasuk ke dalam global *value chain* yang signifikan sebagaimana halnya Vietnam dan Taiwan yang mengekspor produknya ke AS. Sebaliknya, Chili, Malaysia, dan Argentina justru mengekspor produk mereka ke Cina (Saifulloh, 2020).

Maka dari itu, Indonesia dapat memperoleh kesempatan lain sebagai pihak negara yang menempuh jalur diplomatik guna membantu mendamaikan negara yang terlibat “perang dagang”. Jika Indonesia berhasil, tentu akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang berupa peningkatan kekuatan diplomasi di kancah internasional. Dengan kata lain, keuntungan Indonesia tidak hanya diperoleh dari keuntungan sementara di antara “perang dagang”, tetapi juga membawa keuntungan jangka panjang setelah “perang dagang” (Aprilianti, 2019).

Kebijakan ekonomi dan perdagangan AS diperkirakan tidak berubah dari sebelumnya. Selama Indonesia mampu mempertahankan citranya sebagai negara nonblok serta “mitra sampingan” AS, maka hubungan keduanya akan statis. AS ke depannya akan selalu menjadi mitra dagang prioritas untuk ekspor RI, di mana Indonesia akan terus membangun kerjasama strategis dalam kerangka bilateralnya dengan AS. Selain itu, dari sudut pandang multilateral, Indonesia bersama *like-minded countries* dapat mendorong AS untuk memperkuat *rules-based trading system* (Gita, 2021).

Terdapat beberapa fokus perhatian untuk masa yang akan datang. Jika dilihat untuk jangka pendek, Indonesia dapat menguasai pasar AS yang ditinggalkan oleh Cina. Sedangkan untuk jangka panjangnya, Indonesia berusaha menjadi bagian dari *supply chain* AS dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi dari AS.

Perang dagang menjadi pertimbangan serius dalam kebijakan ekonomi negara-negara yang memiliki keterkaitan perdagangan dengan Cina dan AS. Dalam hal ini, banyak investor AS yang berinvestasi ke negara berkembang yang memiliki pasar lebih stabil. Indonesia adalah salah satu tujuan negara berkembang, di mana hal ini ditunjukkan oleh kinerja pasar Indonesia yang saat itu bergerak secara positif walau secara keseluruhan tidak signifikan. Faktanya, saham-saham perusahaan negara berkembang seperti Indonesia semakin diminati oleh para investor asing (AS) dengan menguatnya *trade war* yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump. Terlepas dari berbagai Perspektif Konstruktivisme yang menekankan pentingnya membangun citra terhadap negara lain, maka Indonesia seharusnya mempunyai industri dalam negeri yang kuat untuk masa mendatang agar tidak bergantung pada impor bahan baku dari AS. Selain itu, Indonesia perlu fokus membenahi industri-industri nasionalnya guna mengurangi ketergantungannya pada negara lain.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka ketiga poin ontologi Konstruktivisme menyatakan bahwa hubungan antara AS dan Cina memang telah jauh berbeda, baik itu dari sisi historis, norma, hingga citra kedua negara antara satu dan yang lainnya terlanjur bertolak belakang. Oleh karenanya, tak heran jika kebijakan AS yang merugikan industri Cina menyebabkan industri tersebut mulai merelokasi pabrik-pabrik mereka dari AS ke Indonesia. Akibatnya, para investor asing tertarik kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tentu saja Indonesia menjadi salah satu negara yang dituju karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Jika Indonesia dapat memanfaatkan keadaan ini dengan cermat hingga masa mendatang, maka Indonesia dapat memperbaiki pasar globalnya lebih baik lagi. Hal ini diindikasikan sepanjang periode “perang dagang” antara AS dan Cina pada 2017-2020, di

mana Indonesia memiliki kinerja pasar sehat yang bergerak secara positif. Sehingga, investor asing pun tertarik pada perusahaan-perusahaan Indonesia, seperti perusahaan kelapa sawit sebagaimana diungkapkan berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI). Contoh yang terdapat pada perusahaan kelapa sawit tersebut memiliki peran besar dibanding negara lainnya seperti Malaysia, karena Indonesia telah menjadi salah satu negara industri minyak sawit yang unggul (Paspi, 2017).

Melihat potensi hubungan Indonesia dan AS pada masa mendatang serta peluang bagi Indonesia terkait dengan kemenangan Joe Biden yang dilantik menjadi Presiden AS ke-46 pada Januari 2021, maka dampak kemenangan Biden juga akan terasa di Indonesia untuk ke depannya. Berhubung Indonesia masih berusaha untuk melihat dan menggambarkan dirinya sebagai salah satu pilar AS di Asia Tenggara, maka Indonesia adalah negara yang dianggap penting untuk menjaga agar kawasan Asia Tenggara tetap kondusif. Untuk itu, Joe Biden cenderung akan menjalankan kebijakan multilateralisme yang mengandalkan sekutunya di Asia Tenggara untuk berbagai masalah keamanan (Kantor Komunikasi Publik, 2020).

KESIMPULAN

Proteksionisme yang dilakukan oleh Trump terhadap Cina selama periode 2017-2020 mengakibatkan kondisi ekonomi dunia terguncang. Dampak terbesarnya dapat dirasakan langsung oleh mitra kedua negara tersebut, salah satunya adalah Indonesia. Di tengah krisis serta ketegangan ekonomi yang melanda, tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia berhasil mengatasi sebagian kecil hal-hal tersebut sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau dampak positif akibat fenomena ini, yakni: 1) Meningkatnya ketertarikan investor asing pada perusahaan Indonesia, terutama industri minyak kelapa sawit; 2) Pengalihan barang impor AS seperti alat optik dan kedokteran ke Indonesia; serta 3) Berpeluang memfokuskan sektor ekonomi dalam negeri Indonesia melalui kerjasama luar negerinya dengan AS maupun Cina..

Fenomena menguntungkan tersebut berdampak positif bagi Indonesia. Hal ini dapat ditelaah menggunakan Perspektif Konstruktivisme dengan merujuk pada tiga kajian ontologisnya, yaitu, segi historis antara AS dan Indonesia, norma serta bahasa (komunikasi) yang dijalankan keduanya, serta citra atau *ideas* yang dibangun Indonesia untuk AS. Hasilnya, Indonesia memiliki “hubungan yang mengambang” dengan AS, yakni tak dapat disebut sebagai mitra dekat ataupun musuh.

Analisis dengan menggunakan Perspektif Konstruktivisme ini menjawab peluang hubungan antara Indonesia dan AS pasca pemberlakuan kebijakan proteksi AS di bawah kepemimpinan Trump bahwa hubungan dagang serta ekonomi antara keduanya tak akan berubah untuk waktu yang lama, kecuali Indonesia dapat mengubah citranya, yakni dengan secara terang-terangan memihak atau memusuhi AS. Untuk itu, Indonesia disarankan untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan AS maupun Cina meski tak memihak pada keduanya. Selain itu, Indonesia perlu lebih fokus pada sirkulasi ekonomi domestiknya dibanding berupaya keras dalam menempatkan diri sebagai negara yang bergantung terhadap negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Kurniawati, O., & Hubungan Internasional, J. (n.d.). Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat pada Era Donald Trump. Aprilianti, V. A. (2019). Implikasi Perang Dagang AS Serikat-Cina Terhadap Perdagangan Indonesia. In Skripsi.
- Batubara, E. (2019). Kebijakan Proteksionisme AS Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina. *Jom Fisip*, 6(2), 1689–1699. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/25291/24505>
- Fouda, R. A. N. (2012). Protectionism & Free Trade: A Country's Glory or Doom?

- International Journal of Trade, Economics and Finance, January 2012, 351–355. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2012.v3.226>
- Ghifari, R. (2019). Dinamika Hubungan Indonesia dengan AS. *Geotimes.Id*. <https://geotimes.id/opini/dinamika-hubungan-indonesia-dengan-AS/>
- Gita, V. (2021). Di Era Baru Presiden AS Joe Biden, Indonesia Akan Selalu Jadi Mitra Strategis. *Liputan6*. <https://m.liputan6.com/global/read/4461192/di-era-baru-presiden-as-joe-biden-indonesia-akan-selalu-jadi-mitra-strategis>
- Hadi, N., Malikhah, A., & Alfie, A. A. (2020). Dampak Trade War AS Serikat VS Cina Terhadap Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 193. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8047>
- Kantor Komunikasi Publik. (2020). Kemenangan Joe Biden Membawa Peluang Indonesia. *unpad.ac.id*. <https://www.unpad.ac.id/2020/11/kemenangan-joe-biden-membawa-peluang-bagi-indonesia/>
- Kemendag. (2022). Produk Unggulan Indonesia. *Kemendag*. <http://ppejp.kemendag.go.id/produk-unggulan-indonesia/>
- Kurniawati, A. (2020). Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat pada Era Donald Trump. 2, 1–5.
- Natalia, E. C. (2018). Pandangan Dubes RI untuk AS Soal Proteksionisme Trump. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180216094649-4-4577/pandangan-dubes-ri-untuk-as-soal-proteksionisme-trump>
- Paspi, R. (2017). Proyeksi Vegetable Oil Dunia Tahun 2025: Bagaimana Posisi Indonesia Mendatang? *Gapki.Id*. <https://gapki.id/news/3124/proyeksi-vegetable-oil-dunia-tahun-2025-bagaimana-posisi-indonesia-di-masa-mendatang>
- Puspitarini, R. (2020). Kajian Kebijakan Politik Internasional.
- Rachmawati, D. (2021). Analisis Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan dengan Perspektif Konstruktivisme.
- Ratna, D. S., & Anindita, T. (2018). Terhadap Ekspor Impor Indonesia US-Cina Trade War Impact on Indonesia Trade. *July*, 102–113.
- Reus Smith, C. (2014). Theories of International Relations: Constructivism. In *Theories of International Relations*. <https://doi.org/10.4324/9781315797366>
- Rzn. (2017). Trump Janjikan Kerjasama Erat dengan Indonesia. *DW.Com*. <https://www.dw.com/id/trump-janjikan-kerjasama-erat-dengan-indonesia/a-39622141>
- Sahide, A. (2021). Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3570.1-16>
- Saifulloh, M. R. (2020). Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang AS Serikat – Cina. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.193>
- Sitorus, D. S. (2021). Perang Dagang AS Serikat dan Cina: Bagaimana Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia Tahun 2017 - 2020? *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 13 (1), 187. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v13i1.34192>
- Sukadis, B. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(1), 92–123. <https://doi.org/10.33822/mjih.v1i1.285>
- Triyono, L. (2020). AS Tekan Belanda Agar Akui Kemerdekaan dan Kedaulatan RI. *Voaindonesia.Com*. <https://www.voaindonesia.com/a/as-tekan-belanda-agar-akui-kemerdekaan-dan-kedaulatan-ri-/5547278.html>
- Ulfa, S., & Gustyana, T. T. (2018). Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Perang Dagang Amerika Serikat Dan Cina (Studi Pada

Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Komoditas Kelapa Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) Analysis of the Differences of *Abnormal Return* *Def.*